

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP),
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PIDIE.**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh :

**FUJI SAFIRA
NPM : 1902110100**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 3 Maret 2023

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

FUJI SAFIRA
NPM : 1902110100

Dengan judul:

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP)
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PIDIE**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi

H. Zulkifli Umar, SE., M.Si., Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I

Maidar, SE., M.Si
NIK. 19801231 200802 2 001

Pembimbing II

Yustiana, SE., M.Si
NIK. 19650310 199307 200 1



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

Drs. Faimizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK: 197004081994011001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 3 Maret 2023

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

FUJI SAFIRA
NPM : 1902110100

Dengan judul:

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP)
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PIDIE**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 10 Februari 2023

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Maidar, SE., M.Si
NIK. 19801231 200802 2 001

Anggota

Yusliana, SE., M.Si
NIK. 19650310 199307 200 1

Anggota

Cut Fitrika Svawalina, SE., M.Si
NIK. 19810823 201309 2 001



Mengetahui
Kepala Program Studi Akuntansi
H. Zulkifli Umar, SE., M.Si., Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 3 Maret 2023
Yang Menyatakan



Fuji Safira

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fuji Safira
NPM : 1902110100
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eklusif(Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP) KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PIDIE

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 3 Maret 2023

Yang Menyatakan,


Fuji Safira

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie.”**

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh.

Keberhasilan Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan ketulusan, kasih sayang, dan pengorbanannya memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ini menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahnda Abdul Razak, Ibunda Erma Suryani, serta semua keluargaku (Rima, Rizki, Andi, Vera, Rita, Dinda, dan Syifa) yang telah memberikan doa, kasih sayang, perhatian dan pengorbanan moral dan material yang tidak terkira.
2. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Ibu Hj. Nadiya,SE,M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Bapak H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Ibu Cut Fitrika Syawalina,SE,M.Si selaku Ketua Laboratorium Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Ibu Maidar,SE,M.Si selaku Dosen Pembimbing satu dan Ibu Yuslana,SE,M.Si selaku Dosen Pembimbing dua yang telah memberikan dorongan dan arahan dari merencanakan hingga selesainya penelitian ini.
7. Dosen, staf pengantar dan karyawan di Universitas Muhammadiyah Aceh.
8. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pidie yang telah membantu kelancaran penelitian skripsi ini.
9. Teman-teman yang ada di kampus Universitas Muhammadiyah Aceh khususnya Dina Anggraini, Ardiansyah, Rachman Arita, AL-Halim, Riski Maulana, Riski Amalia, Afrida, Riza Maulidia serta teman di Fakultas Ekonomi yang tidak mungkin penulis sebutkan satu per satu.
10. Teman-teman diluar kampus khususnya Aura, Arini, Husna, Moza, Khaled, Hanum, Uci, Zalfa, serta teman lain yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu.
11. Kepada Yasmine dan Alura keponakan yang selalu menemani (Lebih ke mengganggu) saya dalam proses pengerjaan skripsi ini.
12. Kepada diri saya sendiri karena selalu kuat,mampu bertahan dan bersabar dalam segala proses yang dilewati dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Banda Aceh, 9 Januari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah Penelitian	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
2.1 Landasan Teoritis	11
2.1.1 Laporan Keuangan.....	11
2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).....	15
2.1.3 Standar Akuntan Pemerintah (SAP).....	16
2.1.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)	17
2.1.5 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	18
2.2 Penelitian Sebelumnya	20
2.3 Kerangka Pemikiran.....	25
2.3.1 Hubungan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan Kualitas Laporan Keuangan	25
2.3.2 Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan Kualitas Laporan Keuangan	26
2.3.3 Hubungan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dengan Kualitas Laporan Keuangan	26
2.4 Hipotesis Penelitian.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian.....	29
3.2 Populasi Dan Sampel Penelitian	31
3.2.1 Populasi Penelitian.....	31
3.2.2 Sampel Penelitian.....	31
3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.4 Definisi Operasional dan Variabel Penelitian	34
3.5 Metode Analisis Data.....	36
3.5.1 Uji Kualitas Instrumen dan Data	36
3.5.2 Analisis Statistik Deskriptif	37
3.5.3 Analisa Linier Berganda	38
3.5.4 Rancangan Pengujian Hipotesis	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Gambaran Umum Umum Kabupaten Pidie	41
4.1.1	Sejarah Singkat Kabupaten Pidie.....	41
4.1.2	Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Pidie.....	42
4.2	Data Penelitian	42
4.2.1	Karakteristik Responden.....	43
4.2.2	Variabel Kualitas Laporan Keuangan.....	44
4.2.3	Variabel Standar Akuntansi Pemerintah(SAP).....	45
4.2.4	Variabel Sumber Daya Manusia (SDM).....	47
4.2.1	Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	48
4.3	Analisis Data	50
4.3.1	Uji Kualitas Instrumen dan Data.....	50
4.3.1.1	Uji Validitas Instrumen.....	50
4.3.1.2	Uji Reabilitas Instrumen	51
4.3.2	Analisis Deskriptif	52
4.3.3	Hasil Uji Regresi Linier Berganda	53
4.3.4	Hasil Pengujian Hipotesis.....	56
4.3.5	Hasil Pengujian Determinasi (R^2).....	57
4.4	Pembahasan Hasil Penelitian	58
4.4.1	Pengaruh Penerapan SAP, Kompetensi SDM dan SPIP Terhadap Kualitas LKPD.....	58
4.4.2	Pengaruh Penerapan SAP Terhadap Kualitas LKPD.....	59
4.4.3	Pengaruh Kompetensi SDM Terhadap Kualitas LKPD.....	60
4.4.4	Pengaruh SPIP Terhadap Kualitas LKPD.....	60

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1	Kesimpulan	62
5.2	Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

64

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Opini Audit LKPD Periode 2014-2021 di Indonesia	5
Tabel 1.2 Perkembangan Opini Audit LKPD Provinsi Aceh Periode 2014-2015	6
Tabel 1.3 Perkembangan Opini Audit LKPD Kabupaten Pidie Periode 2014-2015.....	6
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 3.1 Populasi dan Sampel Penelitian	32
Tabel 3.2 Definisi operasional dan pengukuran variabel	35
Tabel 4.1 Karakteristik Responden	43
Tabel 4.2 Penjelasan Responden Tentang Variabel Kualitas Laporan Keuangan.....	44
Tabel 4.3 Penjelasan Responden Tentang Variabel Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).....	46
Tabel 4.4 Penjelasan Responden Tentang Variabel Sumber Daya Manusia (SDM).....	47
Tabel 4.5 Penjelasan Responden Tentang Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).....	49
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas.....	51
Tabel 4.7 Hasil Uji Reabilitas.....	52
Tabel 4.8 Analisis Statistik Deskriptif.....	53
Tabel 4.9 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	54
Tabel 4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	27
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Kuisisioner
- Lampiran 2 : Tabulasi Data
- Lampiran 3 : Karakteristik Responden
- Lampiran 4 : Uji Reliabilitas dan Uji Validitas
- Lampiran 5 : Regresi Linear Berganda
- Lampiran 6 : Deskriptif Statistik

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
(SAP), KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PIDIE.**

**Fuji Safira
1902110100**

Pembimbing I : Maidar, SE, M.Si.
Pembimbing II : Yusliana, SE, M.Si.

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie. Populasi pada penelitian ini berjumlah 64 yaitu pengelola keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi linear berganda dan diolah menggunakan bantuan program SPSS (*Statistica Product And Service Solutions*) versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie baik secara parsial maupun simultan.

Kata kunci : *Pengaruh SAP, Kompetensi SDM, SPIP, Kualitas LKPD.*

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
(SAP), KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP)
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PIDIE.**

**Fuji Safira
1902110100**

Pembimbing I : Maidar, SE, M.Si.
Pembimbing II : Yusliana, SE, M.Si.

ABSTRACT

The purpose of this study was to find out the influence of Government Internal Control Systems (SPIP) on the Quality of Financial Reports for the Local Government of Pidie Regency. The population in this study amounted to 64, namely financial managers in the Regional Apparatus Organization (OPD) of the Pidie Regency Regional Government. The method used in this study is a multiple linear regression analysis models and processed using the help of the SPSS (Statistica Product And Service Solutions) version 22 program. Research results show that The Application of Government Accounting Standards (SAP), Competency of Human Resources (HR) and Government Internal Affairs (SPIP) influences the Quality of the Pidie District Government Financial Reports either partially or simultaneously.

Keywords: Effect of SAP, HR Competence, SPIP, Quality of LKPD.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan aturan yang telah pembangunan pemerintah yang berkualitas. Konsep desentralisasi dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah menunjukkan tiga pola otonomi yaitu otonomi provinsi, otonomi kabupaten dan otonomi desa. Kebijakan ini memberikan kesempatan untuk pemerintah daerah sehingga bisa lebih fokus dalam membangun dan mengembangkan daerah mereka secara mandiri (Dwi et al. 2019).

Dalam hal pengelolaan keuangan, pemerintah melakukan perubahan dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pertanggungjawaban keuangan pemerintahan daerah dilakukan dan disampaikan dalam bentuk laporan keuangan, peraturan ini merupakan usaha konkrit dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 juga mengarah pada bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang ditetapkan oleh pemerintah (Pebriani, 2019).

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk mempublikasikan hasil informasi melalui laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang disebut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Dwi et al. 2019). LKPD setidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan. Selain itu, LKPD harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan keuangan merupakan suatu media informasi bagi sebuah organisasi. Pada pemerintahan daerah, laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban kinerja keuangan kepada publik. Selanjutnya, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah wajib memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan keuangan pemerintah kemudian diberikan kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah juga wajib mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Hartono & Ramdany, 2020). Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat erat hubungannya dengan SAP. Laporan keuangan yang berkualitas harus disusun sesuai dengan aturan dan prinsip yang terdapat dalam standar akuntansi yang berlaku. Oleh sebab itu LKPD harus disusun sesuai dengan SAP yang ditetapkan.

Penyusunan laporan keuangan merupakan suatu proses yang sangat penting untuk dapat mengetahui bagaimana kinerja atau citra suatu organisasi dalam suatu

periode, oleh sebab itu penyusunan laporan keuangan daerah harus didukung dengan SDM yang kompeten agar terciptanya pengelolaan laporan keuangan daerah yang sehat (Pebriani, 2019). SDM adalah pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi tujuannya. Suatu sistem yang baik akan sia-sia bila tidak didukung oleh SDM yang memadai, maka dalam suatu organisasi sangat dibutuhkan SDM yang kompeten. Kompetensi SDM dapat diukur dengan tingkat pendidikan, pengalaman, pengetahuan, dan perilaku (Hartono & Ramdany, 2020).

Faktor lain yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). SPIP merupakan sistem yang diterapkan seluruh lingkungan di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 SPIP terdiri dari beberapa unsur yaitu; lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian internal (Ikyarti & Aprila, 2019). Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 juga menyebutkan bahwa SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efesiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan mengoptimalkan SPIP diharapkan dapat menciptakan LKPD yang berkualitas.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap 535 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2021 yang dilaporkan pada IHPS dua (2) ditemukan 1.118 permasalahan terkait sistem pengendalian intern (SPI). Sebelumnya, yaitu pada tahun 2014 permasalahan SPI juga terjadi, dimana hasil pemeriksaan BPK

terhadap 479 objek Pemerintahan Daerah dan BUMD tahun 2014 yang dilaporkan pada IHPS dua (2), ditemukan bahwa terdapat 1.810 permasalahan mengenai kelemahan SPI (IHPS 2014-2021). Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak permasalahan mengenai SPI dari tahun 2014-2021 yang belum membaik.

Kualitas laporan keuangan pemerintah tiap tahunnya dinilai oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini yang dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan keuangan atas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tujuan dari pemeriksaan atas laporan keuangan untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, terdapat 4 (empat) Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) (BPK RI, 2020). Ketika BPK memberikan opini WTP terhadap suatu LKPD, artinya laporan keuangan yang disajikan entitas daerah tersebut memiliki kualitas yang baik. Menteri Keuangan menyatakan bahwa laporan keuangan yang selalu kita lakukan dan diaudit secara independen oleh BPK bisa dijadikan alat untuk memberikan feedback bagi perencanaan penganggaran yang lebih baik terhadap kinerja pemerintah yang lebih baik dalam rangka untuk mendesain dan mengeksekusi program-program pembangunan dengan lebih baik, karena tujuan dari perbaikan keuangan negara adalah untuk terus meningkatkan kualitas kita dalam menggunakan keuangan negara ini untuk mencapai tujuan melalui proses-proses yang baik (Dwi et al. 2019).

Menurut BPK kualitas laporan keuangan pemerintah daerah memiliki peningkatan yang cukup baik. Pada tahun 2014 dari 539 LKPD yang diperiksa BPK, terdapat 252 atau 47% dari LKPD yang diperiksa memperoleh opini WTP. Sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 541 LKPD yang diperiksa, sebanyak 500 atau 92% LKPD memperoleh opini WTP. Adapun perkembangan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia diungkapkan dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1

Perkembangan Opini Audit LKPD Periode 2014-2021 di Indonesia

LKPD TAHUN	OPINI				
	WTP	WDP	TMP	TW	TOTAL
2014	47%	46%	6%	1%	100%
2015	58%	36%	5%	1%	100%
2016	70%	26%	4%	0%	100%
2017	76%	21%	3%	0%	100%
2018	82%	16%	2%	0%	100%
2019	90%	9%	1%	0%	100%
2020	90%	9%	0,7%	0,3%	100%
2021	92,4%	7%	0,6%	0%	100%

Sumber : IHPS (data diolah, 2022).

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun pada Tabel 1.1 pada tahun 2014, 47% entitas memperoleh opini WTP, 46% entitas memperoleh opini WDP, 6% entitas memperoleh opini TMP, 1% entitas memperoleh opini TW. Sedangkan pada tahun 2019, 90% entitas memperoleh opini WTP, 9% entitas memperoleh opini WDP, 1% entitas memperoleh opini TMP. Dari opini tersebut, bisa dibandingkan bahwa perkembangan opini audit dari tahun 2014 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan yang sangat baik. Meskipun sudah terjadi peningkatan proporsi WTP yang cukup baik, namun pada tahun 2018 dan 2019 masih ditemukan beberapa masalah mengenai kelemahan SPIP dan masalah

lainnya, oleh sebab itu pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kualitas laporan keuangan (Dwi et al. 2019).

Peningkatan kualitas laporan keuangan juga terjadi pada Provinsi Aceh. Peningkatan tersebut di ungkapkan dalam Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Perkembangan Opini Audit LKPD Provinsi Aceh Periode 2014-2021

LKPD Tahun	Opini Audit
2014	WDP
2015	WTP
2016	WTP
2017	WTP
2018	WTP
2019	WTP
2020	WTP
2021	WTP

Sumber: Data diolah tahun 2022

Selain di Indonesia dan Provinsi Aceh, peningkatan atas kualitas laporan keuangan juga terjadi pada Kabupaten Pidie, yaitu kabupaten pidie telah meraih opini WTP 7 tahun berturut-turut, peningkatan tersebut diungkapkan dalam Tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3
Perkembangan Opini Audit LKPD Kabupaten Pidie Periode 2014-2021

LKPD Tahun	Opini Audit
2014	WTP
2015	WTP
2016	WTP
2017	WTP
2018	WTP
2019	WTP
2020	WTP
2021	WTP

Sumber: Data diolah tahun 2022

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pebriani (2019), penerapan SAP tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD), namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Dwi et al. (2019) yang menyatakan bahwa penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Faktor selanjutnya, yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), menurut penelitian Winarni dkk (2020) yang menyatakan bahwa Kompetensi SDM berpengaruh positif terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian Dwi et al. (2019) yang menyatakan bahwa Kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Faktor lainnya yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), penelitian Ikyarti & Aprila (2019) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Tingginehe et al. (2021) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kabupaten Pidie sudah meraih opini WTP 7 kali berturut-turut, namun masih ditemukan kejanggalan yaitu salah satunya pada Dinas Pertanian dan Pangan, sebanyak 68 unit alat mesin pertanian jenis traktor roda dua senilai Rp.2,2 miliar di bawah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie tidak diketahui keberadaanya. Hal itu terungkap berdasarkan hasil temuan BPK RI perwakilan Aceh. BPK juga melakukan uji petik terhadap traktor roda dua tersebut, namun pengurus barang tidak mampu mengumpulkan seluruh kendaraan tersebut (AJNN, 2021).

Adanya perbedaan hasil penelitian dari beberapa peneliti dan fenomena yang terjadi, maka peneliti mencoba menguji kembali beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah dengan melakukan penelitian yang disusun dalam bentuk skripsi dengan judul: **Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pidie.**

Adapun perbedaan yang dilakukan oleh peneliti saat ini dengan peneliti terdahulu yaitu, peneliti menggunakan objek dan waktu yang berbeda.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bermaksud untuk menguji beberapa faktor yang diasumsikan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh secara simultan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie.
2. Apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) secara parsial berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie.
3. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) secara parsial berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie.

4. Apakah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) secara parsial berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) secara simultan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie.
2. Untuk mengetahui pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) secara parsial terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie.
3. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie.
4. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat sebagai berikut :

- a) Bagi Peneliti

Penelitian ini bagi peneliti diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah wawasan serta lebih mendalami dan memahami lagi mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah,serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 1 (S1) pada Universitas Muhammadiyah Aceh.

b) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan tambahan pengetahuan dibidang pemerintah, khususnya penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah (LKPD).

c) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat sebagai masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie untuk mengetahui arti pentingnya penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Pidie.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Laporan keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mendefinisikan laporan keuangan sebagai laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Menurut Harahap (2015:105), laporan keuangan adalah laporan yang menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu entitas pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Menurut Mahmudi (2016:143), laporan keuangan merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan.

Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain. Untuk akuntansi pemerintah di Indonesia seperti yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Fauziah (2018:27) menyatakan bahwa, pelaporan keuangan seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran ;

- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Menurut Erlina et al. (2015:23), Sesuai dengan PSAP No.1 Paragraf 14, komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan, komponen tersebut merupakan indikator pengukuran Penerapan SAP. Indikator Penerapan SAP menurut Erlina et al. (2015:23) adalah sebagai berikut:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Berdasarkan kerangka konseptual PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 61-62, laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/Daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh pelaporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Perubahan SAL)

Berdasarkan kerangka konseptual PP No.71 Tahun 2010 paragraf 63 dinyatakan bahwa laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara PSAP No. 1 Paragraf 41 menyatakan bahwa laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan

secara komperatif dengan periode sebelumnya pos-pos antara lain saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain, dan saldo anggaran lebih akhir.

c. Neraca

Pada Kerangka Konseptual PP No. 71 Tahun 2010 paragraf 64-65 dikatakan bahwa neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik pemerintah maupun masyarakat. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

d. Laporan Operasional (LO)

Pada kerangka konseptual PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 78-79 dijelaskan bahwa laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambahkan ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

e. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas berdasarkan PSAP No.1 Paragraf 101 dan 102 menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos;

- Ekuitas awal
- Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan
- Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas
- Ekuitas akhir

f. Laporan Arus Kas

Kerangka konseptual PP No. 71 Tahun 2010 Paragraf 80-81 menjelaskan bahwa laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

g. Catatan Atas Laporan Keuangan

Kerangka konseptual PP No.71 Tahun 2010 Paragraf 83 memuat bahwa catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan didalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Menurut Fauziah (2018:31), karakteristik laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan persyaratan normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:

a) Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan dan mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu.

b) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- Penyajian jujur informasi digambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan.
- Dapat diverifikasi
- Netralitas informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c) Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ketahun. Perbandingan eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

d) Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Dari definisi laporan keuangan diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa laporan keuangan adalah suatu bentuk pertanggungjawaban mengenai posisi keuangan suatu entitas yang disusun dengan sistem dan standar yang telah ditetapkan yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan.

2.1.2 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indoneisa (KBBI) kualitas berarti tingkat baik buruknya sesuatu, derajat atau taraf mutu. Sedangkan laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mendefinisikan laporan keuangan sebagai laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan sehat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya (Ikyarti & Aprila, 2019).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, kualitas laporan informasi keuangan pemerintah dapat dilihat dari karakteristik kualitatif laporan keuangan tersebut, yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut merupakan persyaratan normatif atau indikator pengukur yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki (Erlina, 2013:8). Keempat karekteristik tersebut yaitu:

1. Relevan
2. Andal
3. Dapat dibandingkan
4. Dapat dipahami.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang disusun harus berdasarkan standar yang telah ditetapkan pemerintah agar dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain.

2.1.3 Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut Fauziah (2018:2), SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi pemerintah yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan adanya standar maka laporan keuangan disajikan berdasarkan pada standar sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat menyajikan informasi yang lengkap dan dapat diandalkan. Halim et al. (2013:261) mengatakan, SAP ditetapkan dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 kemudian digantikan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Peraturan Pemerintah tersebut menjadi dasar hukum pemerintah dalam menyusun laporan keuangan baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Standar tersebut kemudian menjadi tools bagi pemerintah dan masyarakat untuk mempertimbangkan dan mengukur laporan keuangan pemerintah.

Menurut Halim et al. (2016:261), Standar Akuntansi merupakan pedoman dan prinsip-prinsip yang mengatur pelaksanaan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan.

Standar akuntansi sangat dibutuhkan untuk mencapai konsistensi dalam pelaporan.

Berdasarkan pendapat diatas, peneliti menyimpulkan bahwa SAP merupakan dasar pencatatan laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan yang tidak dibuat berdasarkan SAP hasilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya SAP, maka pencatatan laporan keuangan akan menjadi transparan dan akurat, sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Indikator Penerapan SAP menurut Erlina et al. (2015:23) adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Perubahan SAL)
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Perubahan Ekuitas
6. Laporan Arus Kas
7. Catatan Atas Laporan Keuangan

2.1.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Kompetensi berasal dari kata competence yang artinya kecakapan, kemampuan dan wewenang. Kompetensi adalah karakteristik mendasar yang dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap pekerjaan, atau suatu hal dapat memprediksi kinerja yang sangat baik (Sedarmayanti, 2014:126). Menurut Finch dan Crunkilton (1979) dalam Soetrisno (2009:204) mengartikan kompetensi sebagai penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang harus dimiliki oleh SDM organisasi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pekerjaan sesuai dengan yang dibebankan oleh organisasi.

Menurut Bangun (2012:4), salah satu sumber daya organisasi yang memiliki peran penting dalam mencapai tujuannya adalah Sumber Daya Manusia. Oleh karena pentingnya peran manusia dalam Kompetensi baik jangka pendek maupun jangka panjang dalam agenda bisnis, suatu organisasi harus memiliki nilai lebih dibandingkan organisasi lainnya.

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kemampuan pegawai atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Zubaidi dkk, 2019). Hal ini karena sumber daya manusia tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hal-hal yang harus dikerjakan, sehingga laporan keuangan yang disusun dapat diselesaikan dan disajikan dengan baik.

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) adalah suatu keahlian atau kemampuan yang harus dimiliki oleh pekerja agar dapat melakukan tugasnya dengan baik. Menurut Harvesi (2005) dalam Zubaidi et al. (2019) Indikator pengukuran Kompetensi SDM adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan
2. Keterampilan
3. Pemahaman
4. Pengetahuan

2.1.5 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah menyatakan bahwa sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan

memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kendala pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah menyebutkan bahwa keuangan negara perlu adanya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan instansi masing-masing. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberikan keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai sistem pengendalian intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah tersebut (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, maka dikembangkan unsur sistem pengendalian intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Pengembangan unsur sistem pengendalian intern perlu mempertimbangkan aspek biaya manfaat (cost and benefit), Sumber Daya Manusia, dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komprehensif. Unsur Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008 mengacu Pada Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintahan diberbagai negara, yang meliputi:

a. Lingkungan pengendalian

Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan dalam keseluruhan organisasi yang menimbulkan perilaku positif dan mendukung terhadap pengendalian intern dan manajemen yang sehat.

b. Penilaian resiko

Pengendalian intern harus memberikan penilaian atas resiko yang dihadapi unit organisasi baik dari luar maupun dari dalam.

c. Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian membantu memastikan bahwa arahan pimpinan instansi pemerintah dilaksanakan. Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi.

d. Informasi dan komunikasi

Informasi harus dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah dan pihak lain yang ditentukan. Informasi disajikan dalam suatu bentuk dan sarana tertentu serta tepat waktu sehingga memungkinkan pimpinan instansi pemerintah melaksanakan pengendalian dan tanggung jawabnya.

e. Pemantauan

Pemantauan harus dapat menilai kualitas kinerja dari waktu ke waktu dan memastikan bahwa rekomendasi hasil audit dan review lainnya dapat segera ditindaklanjuti.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti menyimpulkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap pemerintahan secara terus menerus untuk melihat efektifitas dan efisiensi sumber daya yang digunakan pemerintahan tersebut.

2.2 Penelitian Sebelumnya

Peneliti menggunakan penelitian terdahulu dari beberapa jurnal berbeda yang dapat mendukung peneliti dalam melakukan penelitian ini. Dwi et al. (2019) melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan SAP, Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan dengan akuntabilitas sebagai variabel intervening. Unit analisis

penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Jambi. Metode yang digunakan adalah kuantitatif, adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis jalur dengan bantuan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAP dan SPIP melalui akuntabilitas berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sedangkan Kompetensi SDM melalui akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Hartono & Ramdany (2020) melakukan penelitian tentang pengaruh standar akuntansi pemerintah (SAP), efektivitas pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif, data penelitian ini berasal dari kuisioner dan diolah menggunakan analisis linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SAP, efektivitas sistem pengendalian internal pemerintah, kompetensi SDM secara persial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Pebriani (2019) melakukan penelitian tentang besarnya pengaruh kompetensi SDM, pemanfaatan TI, penerapan SAP, peran audit internal secara persial maupun bersama-sama terhadap kualitas LKPD dan pengaruhnya yang di moderasi oleh SPIP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan survey eksplanatori dengan ukuran sampel 108 responden. metode analisis data yang digunakan yaitu regresi linier berganda dengan pengujian variabel moderasi menggunakan MRA (Moderated Regression Analysis) dan pengolahan data menggunakan software SPSS versi 23. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi SDM, pemanfaatan TI, penerapan SAP, peran audit internal secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas LKPD, namun secara

persial penerapan SAP tidak berpengaruh secara signifikan. Kemudian secara moderasi variabel peran audit internal yang dimoderasi oleh SPIP tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD.

Winarni et al. (2020) melakukan penelitian tentang dampak penerapan Good Governance, Kompetensi SDM, penerapan SAP, penerapan SPIP, dan pemanfaatan SIPKD terhadap akuntabilitas publik dan kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuisioner yang diberikan kepada responden menggunakan skala likert pada 37 OPD Kota Jambi. Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan PLS (Partial Least Squares). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan good governance, Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan, sedangkan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pemanfaatan sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMKD) secara persial tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Ikyarti & Aprila (2019) melakukan penelitian tentang Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan data primer melalui kuisioner. Metode analisi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan penerapan standar akuntansi pemerintah, implementasi sistem informasi manajemen daerah dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Tingginehe et al. (2021) melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, data dalam penelitian ini diperoleh melalui kuisioner, analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi, penggunaan teknologi, penerapan SAP dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel penerapan SPIP tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Perbedaan hasil penelitian tersebut dijelaskan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Nama Peneliti/Tahun	Metode Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Analisi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud (Studi Kasus Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud). (Tingginehe dkk. 2021)	Kuantitatif	Komitmen organisasi, penggunaan teknologi, penerapan SAP, dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel SPIP tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada satuan kerja perangkat daerah pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.	Penelitian sama-sama meneliti tentang pengaruh penerapan SAP dan SPIP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Dalam penelitian Tingginehe, dkk, hanya menggunakan SAP dan SPIP sebagai Variabel Independen, sedangkan penelitian ini menambahkan variabel Kompetensi SDM.
2	Dampak Penerapan Good Governance, Kompetensi SDM,	Kuantitatif	Penerapan Good Governance, Kompetensi SDM,	Peneliti menggunakan	Peneliti menggunakan objek

No	Judul dan Nama Peneliti/Tahun	Metode Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Penerapan SAP, Penerapan SPIP, dan Pemanfaatan SIPKD Terhadap Akuntabilitas Publik dan Kualitas Laporan Keuangan (Pemerintah Kota Jambi) (Winarni dkk. 2020).		penerapan SAP berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Kota Jambi. Sedangkan penerapan SPIP dan pemanfaatan SIPKD secara persial tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Jambi.	penerapan SAP, Kompetensi SDM, dan SPIP sebagai variabel independen.	penelitian yang berbeda.
3	Pengaruh SAP, Pengendalian Intern, dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Hartono & Ramdany. 2020).	Kuantitatif	SAP, efektivitas sitem pengendalian internal pemerintah, SDM secara persial dan simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.	Peneliti menggunakan kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen.	Peneliti melakukan penelitian pada objek yang berbeda.
4	Pengaruh Penerapan SAP, Kompetensi SDM, dan Sitem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris di Kota Jambi) (Dwi dkk 2019)	Kuantitatif	Penerapan SAP dan SPIP melalui akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan Kompetensi SDM melalui akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.	Penelitian menggunakan peneraan SAP, Kompetensi SDM, dan SPIP sebagai variabel independen.	Peneliti menggunakan objek penelitian yang berbeda.
5	Fator-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyuasin dengan	Kuantitatif	Kompetensi SDM, pemanfaatan TI, penerapan SAP bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas LKPD,	Penelitian menggunakan Kompetensi SDM dan penerapan SAP	Penelitian menggunakan variabel moderasi yaitu SPIP.

No	Judul dan Nama Peneliti/Tahun	Metode Penelitian	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi. (Pebriani. 2019)		namun secara persial penerapan SAP tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD.	sebagai variabel independen.	
6	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. (Ikyarti & Aprila. 2019).	Kuantitatif	Penerapan standar akuntansi pemerintah, implementasi sistem informasi manajemen daerah, dan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan di kabupaten Seluma.	Penelitian menggunakan kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen.	Peneliti menambahkan Kompetensi SDM sebagai variabel independen.

Sumber: Peneliti (data diolah, 2022).

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antar variabel terikat yaitu penerapan standar akuntansi keuangan (SAP), Kompetensi sumber daya manusia (SDM), dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2.3.1 Hubungan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan Kualitas

Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan media informasi bagi suatu entitas, pembaca laporan keuangan juga beragam mulai dari pemerintah hingga masyarakat. Agar laporan keuangan mudah dipahami dan dapat dibandingkan, dibutuhkan suatu

standar penyusunan. Fenomena mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah perlu dikaji lebih dalam. Hal ini disebabkan antara lain oleh rendahnya penerapan SAP dalam penyusunan laporan keuangan. Penerapan SAP yang tepat dan tingkat pemahaman yang baik oleh pengelola keuangan pada instansi Pemerintahan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan (Hartono & Ramdany, 2020).

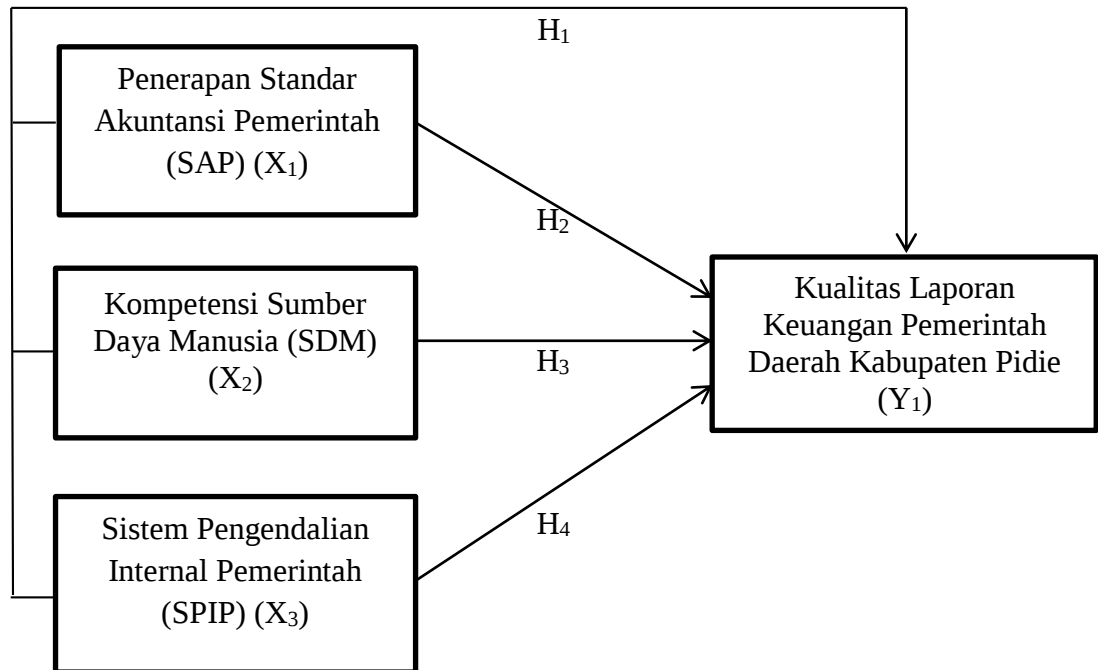
2.3.2 Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga dapat dipengaruhi oleh faktor Kompetensi SDM. Pengelolaan keuangan daerah yang sehat dalam rangka menciptakan *Good Governace* juga harus diikuti dengan SDM yang kompeten. SDM adalah pilar utama penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi tujuannya (Sudarmanto, 2009) dalam (Pebriani 2019).

2.3.3 Hubungan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dengan Kualitas Laporan keuangan

Kualitas laporan keuangan juga dipengaruhi oleh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Pengendalian internal pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dirancang dengan berpedoman pada peraturan pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi dalam proses akuntansi. Efektivitas Sistem Pengendalian Internal mampu meningkatkan reabilitas, objektivitas informasi dan mencegah inkonsistensi dan memudahkan proses audit sehingga dapat mewujudkan keandalan laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang serta kajian pustaka di atas, maka kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pikiran dan penjelasan di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₁ : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie

H₂ : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie

H₃ : Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie

H₄ : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian atau rancang bangun penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun sedemikian rupa, sehingga penelitian dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan penelitian. Rencana itu merupakan skema menyeluruh yang mencakup program penelitian Bungin (2011: 97) Desain penelitian harus mencakup enam (6) aspek sebagaimana diungkapkan oleh Sekaran & Bougie (2017:52).

Penelitian ini mengacu pada rancangan penelitian yang telah dikemukakan oleh Sekaran & Bougie (2017:52) tersebut dengan pedoman pada aspek yang harus terpenuhi. Masing-masing aspek dijelaskan sebagai berikut:

1. Sifat Studi

Sifat studi dalam penelitian ini adalah pengujian hipotesis. Studi yang termasuk dalam pengujian hipotesis biasanya bersifat menjelaskan hubungan tertentu, atau menentukan perbedaan antar kelompok atau kebebasan dua atau lebih faktor dalam suatu situasi Sekaran dan Bougie (2017:62). Pengujian hipotesis yang dilakukan adalah menguji variabel bebas (X) yaitu, penerapan SAP, Kompetensi SDM dan SPIP terhadap variabel terikat (Y) kualitas laporan keuangan.

2. Jenis Investigasi

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Jenis investigasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kausal. Studi kausal adalah studi dimana peneliti ingin menemukan penyebab dari satu atau lebih masalah Sekaran & Bougie (2017:64). Masalah dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan pada Kabupaten Pidie berpotensi dipengaruhi oleh penerapan SAP, Kompetensi SDM dan SPIP.

3. Tingkat Intervensi Penelitian Terhadap Studi

Tingkat intervensi penelitian dalam penelitian ini adalah intervensi minimal. Peneliti hanya menyebarkan kuisioner tanpa mengintervensi aktivitas normal terhadap kasus yang diteliti. Kasus yang diteliti dalam penelitian ini yaitu penerapan SAP, Kompetensi SDM dan SPIP terhadap kualitas laporan keuangan.

4. Situasi Studi

Situasi studi dalam penelitian ini adalah tidak diatur. Penelitian ingin mengetahui pengaruh penerapan SAP, Kompetensi SDM dan SPIP terhadap kualitas laporan keuangan tanpa intervensi peneliti terhadap sumber datanya. Oleh karena itu situasi studi ditampilkan dengan normal tanpa ada desakan dari peneliti terhadap data-datanya.

5. Unit Analisis

Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya (Sekaran & Bougie 2017:73). Unit analisis dalam penelitian ini yaitu OPD di Kabupaten Pidie yang berjumlah 35 yang terdiri dari Inspektorat, Bagian/Sekretariat, Dinas Daerah, Badan Pemerintah, dan

Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Wajib Keistimewaan dan Kekhususan Aceh.

6. Horizon Waktu

Horizon waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah time series, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan rentang waktu terhadap berbagai sampel dan populasi, Sugiyono (2013:74).

3.2 Populasi Dan Sampel Penelitian

3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi dapat didefinisikan sebagai suatu kumpulan subjek, variabel, konsep, atau fenomena. Peneliti dapat meneliti setiap anggota populasi untuk mengetahui sifat populasi bersangkutan (Morissan, 2012:109). Populasi dalam penelitian ini adalah PPK-OPD Kabupaten Pidie, yang terdiri dari 19 Dinas, 4 Badan Pemerintahan, 8 perangkat daerah kekhususan, 2 sekretariat, dan 2 inspektorat, total populasi dalam penelitian ini adalah 35.

3.2.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013:39). Teknik sumpling yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode sensus (sampel jenuh), menurut Sugiono (2011:156) teknik sampel jenuh (sensus) adalah teknik pengambilan sampel dimana seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Alasan peneliti melakukan sensus, yaitu peneliti mempertimbangkan untuk meneliti seluruh elemen-elemen dari populasi, jika elemen populasi relatif sedikit dan variabilitas setiap elemennya

tinggi (heterogen). Sampel dalam penelitian ini adalah Bagian keuangan keuangan PPK-OPD Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie yang dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Populasi dan Sampel Penelitian

No	Badan/ Dinas/ Kantor	Responden	Jumlah Sampel
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Bagian Keuangan	2
2	Dinas Kesehatan	Bagian Keuangan	2
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Bagian Keuangan	2
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Bagian keuangan	2
5	Dinas Sosial	Bagian keuangan	2
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan	Bagian keuangan	2
7	Dinas Lingkungan Hidup	Bagian keuangan	2
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bagian keuangan	2
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	Bagian keuangan	2
10	Dinas Perhubungan	Bagian keuangan	2
11	Dinas Komunikasi, Informatika dan Sandi	Bagian keuangan	2
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Bagian keuangan	2
13	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bagian keuangan	2
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Bagian keuangan	2
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Bagian keuangan	2
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	Bagian keuangan	2
17	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Bagian keuangan	2
18	Dinas Pertanian dan Pangan	Bagian keuangan	2
19	Dinas Perkebunan dan Perternakan	Bagian keuangan	2
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Bagian keuangan	2
21	Badan Pengelolaan Keuangan	Bagian keuangan	2
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Bagian keuangan	2
23	Dinas Syariat Islam	Bagian keuangan	2
24	Dinas Pendidikan Dayah	Bagian keuangan	2
25	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	Bagian Keuangan	2
26	Sekretariat Majelis Adat Aceh	Bagian Keuangan	2
27	Sekretariat Majelis Pendidikan Kabupaten	Bagian Keuangan	2
28	Sekretariat Baitul Mal	Bagian Keuangan	2
29	Dinas Pertahanan Kabupaten Pidie	Bagian keuangan	2
30	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	Bagian keuangan	2
31	Badan Penanggulangan Bencana	Bagian keuangan	2
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bagian keuangan	2
33	Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie	Bagian Keuangan	2

No	Badan/ Dinas/ Kantor	Responden	Jumlah Sampel
34	Sekretariat DPRK Pidie	Bagian Keuangan	2
35	Inspektorat Kabupaten Pidie	Bagian Keuangan	2
	Total Populasi/Sampel		70

Sumber: Data diolah, tahun 2022.

3.3 Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian (Bungin, 2011:132). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner. kuisioner merupakan alat pengumpulan data yang efektif karena dapat diperolehnya data standar yang dapat dipertanggungjawabkan untuk keperluan analisis menyeluruh tentang karakteristik populasi yang diteliti. Pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan survei, survei merupakan pengumpulan data yang yang relative terbatas dari kasus yang relative besar jumlahnya. Survei yang dilakukan berupa survei sensus, yaitu merupakan survei yang mencakup seluruh populasi yang dijadikan objek penyelidikan (Dantes. 2012:117).

Kuisioner akan diberikan kepada pengelola keuangan PPK-OPD dengan diantar langsung oleh peneliti kemudian diberikan waktu dalam 2 minggu bagi PPK-OPD untuk mengisi kuisioner tersebut. Setelah 2 minggu kuisioner diambil kembali oleh penelitan apabila dalam jangka waktu 2 minggu kuisioner tersebut belum diserahkan, maka dinyatakan bahwa kuisioner tersebut tidak kembali. Pilihan jawaban kuisioner menggunakan skala likert. Menurut Morissan (2012:88), skala likert dirumuskan dengan 5 jawaban yaitu; Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-ragu (RG) Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).

3.4 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Variabel adalah sesuatu yang dapat membedakan atau mengubah nilai. Nilai dapat berbeda pada waktu yang berbeda untuk objek atau orang yang sama, atau nilai dapat berbeda dalam waktu yang sama untuk orang atau objek yang berbeda (Erlina dkk. 2015:33). Ada dua jenis variabel penelitian, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen sering juga disebut variabel terikat atau variabel tidak bebas, variabel ini merupakan variabel utama yang menjadi faktor yang berlaku dalam investigasi, variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan. Variabel independen sering juga disebut variabel bebas, variabel ini adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, baik secara positif atau negatif Sugiyono (2013:39). Dalam penelitian ini variabel independennya adalah penerapan SAP, Kompetensi SDM, dan SPIP.

Penerapan SAP, Kompetensi SDM, SPIP, dan kualitas laporan keuangan diukur menggunakan skala sikap Likert. Untuk penilaiannya adalah sebagai berikut:

1. Sangat Setuju (SS) skor 5
2. Setuju (S) skor 4
3. Ragu-ragu (RG) skor 3
4. Tidak Setuju (TS) skor 2
5. Sangat Tidak Setuju (STS) skor 1

Berdasarkan keempat variabel tersebut, maka disusun kuisisioner yang memuat indikator-indikator yang dimuat pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Definisi operasional dan pengukuran variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Ukur	Item Pertanyaan
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (X1)	Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyajikan dan menyusun laporan dalam rangka menciptakan transparansi keuangan pemerintah dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan (Fauziah, I. 2018).	1. Laporan realisasi anggaran	Likert	SAP1
		2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih		SAP2
		3. Neraca		SAP3
		4. Laporan operasional		SAP4
		5. Laporan arus kas		SAP5
		6. Laporan perubahan ekuitas		SAP6
		7. Catatan atas laporan keuangan.		SAP7
Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) (X2)	Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kemampuan pegawai atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Zubaidi et al. 2019).	1. Kemampuan	Likert	SDM1
		2. Keterampilan		SDM2
		3. Pemahaman		SDM3
		4. Pengetahuan		SDM4
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) (X3)	Proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset	1. Lingkungan pengendalian	Likert	SPIP1
		2. Penilaian resiko		SPIP2
		3. Kegiatan pengendalian		SPIP3
		4. Informasi dan komunikasi		SPIP4

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Ukur	Item Pertanyaan
	negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP No.60 Tahun 2008).	5. Pemantauan pengendalian internal		SPIP5
Kualitas Laporan Keuangan (KLK) (Y)	Ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. (PP No.71 Tahun 2010)	1. Relevan	Likert	KLK1
		2. Andal		KLK2
		3. Dapat dibandingkan		KLK3
		4. Dapat dipahami		KLK4

Sumber: Peneliti (data diolah, 2022)

3.5 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah uji kualitas instrumen dan data, analisis statistik deskriptif, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis dengan menggunakan software SPSS (*Statistica Product And Service Solutions*) versi 22.

3.5.1 Uji kualitas instrumen dan data

1. Uji validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instrumen atau alat ukur telah menjalankan fungsi ukurnya. Validitas menunjukkan ketepatan dan kecermatan alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Suatu skala pengukuran disebut valid bila ia melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Bila skala pengukuran tidak valid maka ia tidak bermanfaat bagi peneliti karena tidak mengukur apa yang seharusnya apa yang seharusnya diukur atau melakukan apa yang seharusnya dilakukan (Sugiyono,

2013:121). Perhitungan dilakukan dengan menggunakan korelasi product moment. Adapun teknik korelasi produk moment adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(N \sum X^2 - (\sum X)^2)(N \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Keterangan :

- r : koefisien korelasi pearson
- N : banyak pasangan nilai X dan Y
- $\sum XY$: jumlah dari hasil kali nilai X dan nilai Y
- $\sum X$: jumlah nilai X
- $\sum Y$: jumlah nilai Y
- $\sum X^2$: jumlah dari kuadrat X
- $\sum Y^2$: jumlah dari kuadrat nilai Y
- e : error term

Kriteria dalam menentukan validitas suatu kuisioner adalah sebagai berikut:

- 1 Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka pertanyaan dinyatakan valid.
- 2 Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka pertanyaan dinyatakan tidak valid.

2. Uji reliabilitas

Uji reliabilitas berkaitan dengan masalah adanya kepercayaan terhadap instrumen penelitian. Suatu instrumen dapat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi (konsisten) jika hasil dari pengujian instrumen tersebut menunjukkan hasil yang tetap. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui tingkat kestabilan suatu alat ukur (Sugiyono 2013:122).

3.5.2 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang

berlaku untuk umum atau generalisasi. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendiskripsikan data sampel (Sugiyono, 2013:147).

3.5.3 Analisa Linier Berganda

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis statistik regresi linier berganda. Persamaan yang digunakan adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y	= Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
a	= Konstanta
b ₁ b ₂ b ₃	= Koefesien regresi berganda
X ₁	= Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
X ₂	= Kompetensi Sumber Daya Manusia
X ₃	= Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
e	= Error Term

3.5.4 Rancangan Pengujian Hipotesis

Rancangan pengujian hipotesis merupakan penyusunan alternatif jawaban untuk menjawab ketiga rumusan masalah dalam penelitian. Rancangan tersebut dinyatakan dalam hipotesis yaitu:

H₁ : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie.

H₂ : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie.

H₃ : Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Lporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie.

H₄ : Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie.

Untuk mengetahui Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie dapat dilakukan dengan melihat hasil melihat hasil *output* SPSS. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

H₁ : Jika β_i ($i = 1, 2, 3$) = 0, maka H_1 ditolak. Artinya Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) secara simultan tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie.

H₁ : Sebaliknya, paling tidak ada satu dari β_i ($i = 1, 2, 3$) $\neq 0$, maka H_1 diterima. Artinya Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie.

Selanjutnya, untuk mengetahui Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie dapat diketahui dengan melihat hasil *output* SPSS. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut (Supranto, J. 2010:190).

H₂ : Jika $\beta_1 = 0$, maka H₂ ditolak, artinya Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie.

H₂ : Jika $\beta_1 \neq 0$, maka H₂ diterima, artinya Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie.

H₃ : Jika $\beta_2 = 0$, maka H₃ ditolak, artinya Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie.

H₃ : Jika $\beta_2 \neq 0$, maka H₃ diterima, artinya Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie.

H₄ : Jika $\beta_3 = 0$, maka H₄ ditolak, artinya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie.

H₄ : Jika $\beta_3 \neq 0$, maka H₄ diterima, artinya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Pidie

4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Pidie

Kabupaten Pidie adalah salah satu kabupaten di provinsi Aceh, Indonesia. Pusat pemerintahan kabupaten ini berada di Sigli, Kabupaten Pidie merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk kedua terbesar di Provinsi Aceh. Jumlah penduduk kabupaten pidie pada tahun 2021 sebanyak 435.492 jiwa dengan kepadatan 141 jiwa/km². Berdasarkan laporan situs resmi kabupaten Pidie, Pidie memiliki luas wilayah 3562,15 Km². Kabupaten Pidie terdiri dari 23 kecamatan, yaitu:

1. Geumpang
2. Mane
3. Glumpang Tiga
4. Glumpang Baro
5. Mutiara
6. Mutiara Timur
7. Tangse
8. Tiro/Trungseb
9. Keumala
10. Titeue
11. Sakti
12. Mila
13. Padang Tiji
14. Delima
15. Grong-grong
16. Indrajaaya
17. Peukan Baro
18. Kembang Tanjong
19. Simpang Tiga

- 20. Kota Sigli
- 21. Pidie
- 22. Bate
- 23. Muara Tiga

4.1.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Pidie

Adapun struktur organisasi pemerintah Kabupaten Pidie sebagai berikut:

- 1. Sekretariat
 - a. Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie
 - b. Sekretariat DPRK Pidie
 - c. Inspektorat Kabupaten Pidie
- 2. 19 Dinas Daerah
- 3. 3 Badan Daerah
- 4. 8 perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib keistimewaan dan kekhususan Aceh
- 5. 2 perangkat Daerah yang melaksanakan peraturan perundang-undangan secara khusus
- 6. 1 Bupati dan 1 Wakil Bupati
- 7. 23 Kecamatan
- 8. 730 Kelurahan

4.2 Data Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan SAP, Kompetensi SDM dan SPIP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuisioner yang disampaikan langsung kepada para responden.

Kuisisioner yang telah selesai diisi oleh responden dikumpulkan kembali untuk selanjutnya ditabulasikan dalam Microsoft Office Exel 2010 dan diolah dengan menggunakan program SPSS for windows versi 22. Adapun waktu mengumpulkan data kurang lebih 1 bulan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan beberapa tahap, yaitu dengan menyebarkan 70 kuisisioner kepada responden yang berada pada OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Pidie yaitu 35 OPD. Sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan, dari 70 kuisisioner yang dibagikan sebanyak 64 kuisisioner yang kembali.

4.2.1 Karakteristik Responden

Data karakteristik responden yang digunakan dalam penelitian ini dilihat dari segi jenis kelamin, latar belakang pendidikan dan lama bekerja di OPD Kabupaten Pidie.

Tabel 4.1
Karakteristik Responden

NO	Keterangan	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Jenis kelamin		
	a. Laki-laki	31	48,4%
	b. Perempuan	33	51,6%
	Total	64	100%
2	Pendidikan akhir		
	a. SMA/Sederajat	0	0%
	b. Diploma	6	9,4%
	c. Sarjana S-1	51	79,7%
	d. Pasca Sarjana S-2	7	10,9%
	e. Doktor S-3	0	0%
	Total	64	100%
3	Masa kerja		
	a. < 5 tahun	5	7,8%
	b. 5-10 tahun	41	64,1%
	c. > 10 tahun	18	28,1%
	Total	64	100%

Sumber : Data diolah SPSS,2023

1. Berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa sekitar 31 atau 48,4% responden adalah laki-laki, dan selebihnya yaitu 33 atau 51,6% responden didominasi oleh perempuan.
2. Berdasarkan pendidikan akhir menunjukkan bahwa 51 atau 79,7% responden didominasi oleh lulusan Sarjana S-1, lulusan Pasca Sarjana S-2 7 atau 10,9% responden dan lulusan Diploma 6 atau 9,4% responden.
3. Berdasarkan masa kerja menunjukkan bahwa 41 atau 64,1% responden bekerja selama 5-10 tahun, 18 atau 28,1% responden bekerja selama 10 tahun lebih dan 5 atau 7,8% responden bekerja selama kurang dari 5 tahun.

4.2.2 Variabel Kualitas Laporan Keuangan

Penjelasan responden tentang variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pidie dapat dilihat pada tabel 4.2.

Penjelasan Responden Tentang Variabel Kualitas Laporan Keuangan
Table 4.2

No	Item Pertanyaan	Sangat Setuju		Setuju		Ragu-ragu		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Mean
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
1	Laporan keuangan menyediakan informasi yang relevan andal dengan menegaskan dan dapat mengoreksi aktivitas keuangan di masa lalu	9	86	55	14	0	0	0	0	0	0	4,14
2	Informasi dalam laporan keuangan dapat diandalkan dan diuji, dan apabila diuji oleh pihak yang berbeda akan mewujudkan simpulan	12	18,8	49	76,6	3	4,7	0	0	0	0	4,14

	yang sama											
3	Laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya	17	27	47	73	0	0	0	0	0	0	4,27
4	Informasi laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipahami dengan jelas sesuai dengan peraturan yang berlaku	14	21,9	49	76,6	1	1,6	0	0	0	0	4,20

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.2 di atas pada indikator pertama bahwa Laporan keuangan yang menyediakan informasi yang relevan andal dengan menegaskan serta dapat mengoreksi aktivitas keuangan di masa lalu diperoleh nilai rata-rata 4,14 yang berarti responden menyatakan setuju. Informasi dalam laporan keuangan dapat diandalkan dan diuji, dan apabila diuji oleh pihak yang berbeda akan mewujudkan simpulan diperoleh nilai rata-rata 4,14 yang berarti responden menyatakan setuju. Laporan keuangan yang dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya diperoleh nilai rata-rata 4,27 yang berarti responden menyatakan setuju. Informasi laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipahami dengan jelas sesuai dengan peraturan yang berlaku memperoleh nilai rata-rata 4,20 yang berarti responden menyatakan setuju. Dapat disimpulkan bahwa nilai rerata pada variabel kualitas laporan keuangan sebesar 4,18, artinya rata-rata responden menyatakan setuju pada variabel kualitas laporan keuangan.

4.2.3 Variabel Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Penjelasan responden tentang variabel Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie dapat dilihat pada tabel 4.3.

Penjelasan Responden Tentang Variabel Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
Tabel 4.3

No	Item Pertanyaan	Sangat Setuju		Setuju		Ragu-ragu		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Mean
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
1	Laporan realisasi anggaran sudah selesai dengan standar yang berlaku	10	16	54	84	0	0	0	0	0	0	4,16
2	Informasi dalam laporan perubahan saldo disajikan apa adanya sesuai dengan transaksi dan peristiwa keuangan yang seharusnya disajikan	21	32,8	42	65,6	1	1,6	0	0	0	0	4,31
3	Neraca yang dibuat sudah sesuai dengan prosedur	10	15,6	54	84,4	0	0	0	0	0	0	4,14
4	Laporan operasional yang dibuat sudah sesuai dengan prosedur	13	20,3	50	78,1	1	1,6	0	0	0	0	4,19
5	Laporan arus kas yang dilakukan oleh pegawai sudah sesuai standar	13	20,3	51	79,7	0	0	0	0	0	0	4,20
6	Perubahan ekuitas yang dilakukan berdasarkan laporan keuangan	18	28,1	42	65,6	4	6,3	0	0	0	0	4,22
7	Catatan atas laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan	13	20,3	51	79,7	0	0	0	0	0	0	4,20

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.3 di atas pada indikator pertama bahwa Laporan realisasi anggaran sudah disajikan dengan standar yang berlaku memperoleh nilai rata-rata 4,16 yang berarti responden menyatakan setuju. Informasi dalam laporan perubahan saldo disajikan apa adanya sesuai dengan transaksi dan peristiwa keuangan yang seharusnya disajikan memperoleh nilai rata-rata 4,31 yang berarti responden menyatakan setuju. Laporan Neraca yang dibuat sudah sesuai dengan

prosedur memperoleh nilai rata-rata 4,14 yang berarti responden menyatakan setuju. Laporan operasional yang dibuat sudah sesuai dengan prosedur memperoleh nilai rata-rata 4,19 yang berarti responden menyatakan setuju. Laporan arus kas yang dilakukan oleh pegawai sudah sesuai standar memperoleh nilai rata-rata 4,20 yang berarti responden menyatakan setuju. Perubahan ekuitas yang dilakukan berdasarkan laporan keuangan memperoleh nilai rata-rata 4,22 yang berarti responden menyatakan setuju. Catatan atas laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan memperoleh nilai rata-rata 4,20 yang berarti responden menyatakan setuju. Dapat disimpulkan bahwa nilai rerata pada variabel kualitas laporan keuangan sebesar 4,2, artinya rata-rata responden menyatakan setuju pada variabel standar akuntansi pemerintah.

4.2.4 Variabel Sumber Daya Manusia (SDM)

Penjelasan responden tentang variabel Sumber Daya Manusia (SDM)

Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie dapat dilihat pada tabel 4.4.

Penjelasan Responden Tentang Variabel Sumber Daya Manusia (SDM)
Tabel 4.4

No	Item Pertanyaan	Sangat Setuju		Setuju		Ragu-ragu		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Mean
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
1	Saya memiliki kemampuan dibidangnya dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik	8	12,5	56	87,5	0	0	0	0	0	0	4,13
2	Saya memiliki kecakapan dan keterampilan dalam menganalisis transaksi dan mengelola laporan keuangan	7	10,9	57	89,1	0	0	0	0	0	0	4,11
3	Saya memiliki pemahaman tentang struktur organisasi	10	15,6	54	84,4	0	0	0	0	0	0	4,13

	tempat kerja											
4	Saya memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang teknologi informasi	7	10,9	57	89,1	0	0	0	0	0	0	4,11

Sumber : Data diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.4 di atas pada indikator pertama bahwa responden yang memiliki kemampuan dibidangnya dan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik memperoleh nilai rata-rata 4,13 yang berarti responden menyatakan setuju. Responden memiliki kecakapan dan keterampilan dalam menganalisis transaksi dan mengelola laporan keuangan memperoleh nilai rata-rata 4,11 yang berarti responden menyatakan setuju. Responden yang memiliki pemahaman tentang struktur organisasi tempat kerja memperoleh nilai rata-rata 4,13 yang berarti responden menyatakan setuju. Responden yang memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang teknologi informasi memperoleh nilai rata-rata 4,11 yang berarti responden menyatakan setuju. Dapat disimpulkan bahwa nilai rerata pada variabel kualitas laporan keuangan sebesar 4,12, artinya rata-rata responden menyatakan setuju pada variabel sumber daya manusia.

4.2.5 Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Penjelasan responden tentang variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie dapat dilihat pada tabel 4.5.

**Penjelasan Responden Tentang Variabel Sistem Pengendalian Internal
Pemerintah (SPIP)**

Tabel 4.5

No	Item Pertanyaan	Sangat Setuju		Setuju		Ragu-ragu		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Mean
		Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	Frk	%	
1	OPD tempat saya bekerja telah menerapkan Standar Operating Procedure (SOP) secara tertulis.	7	10,9	57	89,1	0	0	0	0	0	0	4,11
2	Ditempat saya bekerja telah menerapkan pengendalian intern dan manajemen terhadap resiko salah saji.	7	10,9	57	89,1	0	0	0	0	0	0	4,11
3	Setiap transaksi dan aktivitas ditempat saya bekerja telah didukung dengan otorisasi dari pihak yang berwenang	2	3,1	62	96,9	0	0	0	0	0	0	4,03
4	Ditempat saya bekerja telah melaksanakan sistem akuntansi yang memungkinkan audit.	7	10,9	57	89,1	0	0	0	0	0	0	4,11
5	Dalam waktu yang tidak ditentukan pimpinan melakukan pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi.	0	0	46	71,9	18	28,1	0	0	0	0	3,72

Sumber : Data dioalah (2023)

Berdasarkan tabel 4.4 di atas pada indikator pertama bahwa OPD tempat responden bekerja yang telah menerapkan Standar Operating Procedure (SOP) secara tertulis memperoleh nilai rata-rata 4,11 yang berarti responden menyatakan setuju. tempat bekerjaresponden yang telah menerapkan pengendalian intern dan manajemen terhadap resiko salah saji memperoleh nilai rata-rata 4,11 yang berarti responden menyatakan setuju. Setiap transaksi dan aktivitas ditempat bekerja responden yang telah didukung dengan otorisasi dari pihak yang berwenang

memperoleh nilai rata-rata 4,03 yang berarti responden menyatakan setuju. Tempat bekerja responden yang telah melaksanakan sistem akuntansi yang memungkinkan audit memperoleh nilai rata-rata 4,11 yang berarti responden menyatakan setuju. Dalam waktu yang tidak ditentukan pimpinan melakukan pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi memperoleh nilai rata-rata 3,72 yang berarti responden menyatakan setuju. Dapat disimpulkan bahwa nilai rerata pada variabel kualitas laporan keuangan sebesar 4, artinya rata-rata responden menyatakan setuju pada variabel sistem pengendalian internal pemerintah.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Uji Kualitas Instrumen dan Data

Sebelum melakukan pengujian deskripsi data penelitian maupun untuk pengujian hipotesis maka perlu dilakukan uji validitas dan reabilitas data karena jenis data penelitian adalah data primer.

4.3.1.1 Uji Validitas Instrumen

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistic, yaitu dengan menggunakan uji *Pearson Product-Moment Coefficient og Correlation* melalui program SPSS for Windows. Hal pertama yang perlu dilakukan dalam uji validitas adalah mentabulasikan data, tertera pada lampiran. Kemudian berdasarkan hasil analisis didapat nilai korelasi antara skor item dengan skor total. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai r tabel, r tabel dicari pada signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan jumlah data (N=64), maka kemudian didapat r tabel sebesar 0,246.

Tabel 4.6 menunjukkan hasil validitas bahwa seluruh item pertanyaan memenuhi syarat nilai r tabel yaitu lebih dari 0,246.

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	Koefesien Korelasi	r Tabel (N=64)	Keterangan
Kualitas LKPD	KLK1	0,756	0,246	Valid
	KLK2	0,797	0,246	Valid
	KLK3	0,782	0,246	Valid
	KLK4	0,786	0,246	Valid
Penerapan PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP)	SAP1	0,474	0,246	Valid
	SAP2	0,533	0,246	Valid
	SAP3	0,595	0,246	Valid
	SAP4	0,594	0,246	Valid
	SAP5	0,514	0,246	Valid
	SAP6	0,489	0,246	Valid
	SAP7	0,602	0,246	Valid
Kompetensi SDM	SDM1	0,916	0,246	Valid
	SDM2	0,949	0,246	Valid
	SDM3	0,907	0,246	Valid
	SDM4	0,843	0,246	Valid
SPIP	SPIP1	0,820	0,246	Valid
	SPIP2	0,820	0,246	Valid
	SPIP3	0,433	0,246	Valid
	SPIP4	0,571	0,246	Valid
	SPIP5	0,533	0,246	Valid

Sumber : Data diolah SPSS 2023

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, dapat dijelaskan bahwa semua pertanyaan mempunyai nilai korelasi diatas nilai r tabel yaitu 0,246, sehingga dapat disimpulkan pengujian dalam penelitian ini sudah valid yang berarti pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat mengukur aspek yang di uji. Dan dinyatakan bahwa data yang diperoleh adalah valid dan dapat dipergunakan untuk penelitian.

4.3.1.2 Uji Reabilitas Instrumen

Pengujian reabilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang mempunyai validitas. Instrumen penelitian ini menggunakan teknik *Cronbach Alpha* (α)

dengan bantuan SPSS. *Cronbach Alpha* menafsirkan korelasi antar skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang ada. Jika nilai koefisien Alpha $> 0,6$ maka disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut handal dan reliabel. Hasil uji reabilitas dapat dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4.7
Hasil Uji Reabilitas

Variabel	Cronbach' Alpha (α)	Nilai Minimal Keandalan	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	0,782	0,60	Handal
Penerapan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	0,631	0,60	Handal
Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)	0,920	0,60	Handal
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	0,600	0,60	Handal

Sumber : Data diolah 2023

Berdasarkan tabel 4.3 di atas dapat dilihat hasil uji reabilitas dari nilai *Cronbach Alpha*. Nilai *Cronbach Alpha Reability* yang baik adalah yang semakin mendekati 1, jika nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$ maka disimpulkan bahwa instrumen penelitian tersebut handa dan reliabel. Dari hasil pengujian reabilitas pada Tabel 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa semua variabel yang di uji sudah handal karena memiliki nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0.60.

4.3.2 Analisis Deskriptif

Dari hasil kuisioner yang kembali, diperoleh gambaran mengenai variabel penelitian yang dapat dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4.8
Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TOTAL_KLK	64	15	20	16.75	1.333
TOTAL_SAP	64	25	35	29.36	1.776
TOTAL_SDM	64	15	20	16.47	1.208
TOTAL_SPIP	64	19	24	20.08	1.013
Valid N (listwise)	64				

Sumber : Data diolah SPSS 2023

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel 4.8, dapat dijelaskan bahwa penggambaran mengenai pendeskripsian data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Kabupaten Pidie memiliki jumlah responden sebanyak 64, dengan nilai minimum 25,00, nilai maksimum 35,00 dan mean (nilai rata-rata) sebesar 29,36. Standar Deviation atau simpangan data Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebesar 1,78.
2. Variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Pidie memiliki jumlah responden sebanyak 64, dengan nilai minimum 15,00, nilai maksimum 20,00 dan mean 16,47. Standar Deviation atau simpangan data Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) sebesar 1,21.
3. Variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Kabupaten Pidie memiliki jumlah responden sebanyak 64, dengan nilai minimum 19,00, nilai maksimum 24,00 dan nilai rata-rata 20,08. Standar Deviation atau simpangan data Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebesar 1,01.

4. Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pidie memiliki jumlah sampel sebanyak 64, dengan nilai minimum 15,00, nilai maksimum 20,00 dan mean 16,75. Standar Deviation atau simpangan data Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebesar 1,33.

4.3.3 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Untuk mengetahui Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pidie dilakukan pengujian dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan bantuan SPSS diperoleh hasil uji pada tabel 4.9.

Tabel 4.9
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-2.270	3.974		.570
	TOTAL_SAP	.338	.084	.451	.000
	TOTAL_SDM	.188	.119	.170	.120
	TOTAL_SPIP	.298	.146	.227	.045

a. Dependent Variable: TOTAL_KLK
Sumber : Data diolah SPSS 2023

Berdasarkan tabel 4.9, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = -2,270 + 0,338X_1 + 0,188 X_2 + 0,298 X_3 + e$$

Dari persamaan regresi linier berganda di atas dapat diketahui hasil penelitian sebagai berikut:

1. Hasil persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini memiliki nilai konstanta sebesar negative -2,270 atau -227%, artinya bila Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (X_1), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) (X_2) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) (X_3) dianggap konstan, maka tingkat Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pidie memiliki nilai konstan berpengaruh negative atau menurun 2,270 pada satuan skala likert.
2. Koefesien regresi variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (X_1) sebesar 0,338 atau 33,8%. Artinya setiap 33,8% perubahan pada variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) akan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pidie dengan asumsi variabel independen dianggap konstan.
3. Koefesien regresi variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) (X_2) sebesar 0,188 atau 18,8%. Artinya setiap 18,8% perubahan pada variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) akan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pidie dengan asumsi variabel independen dianggap konstan.
4. Koefesien regresi variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) (X_3) sebesar 0,298 atau 28,9%. Artinya setiap 28,9% perubahan dalam variabel Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) akan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pidie dengan asumsi variabel independen dianggap konstan.

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat diketahui bahwa dari ke dua variabel yang di teliti ternyata variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mempunyai pengaruh dominan dalam meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pidie, karena diperoleh koefesien regresi sebesar 33,8%.

4.3.4 Hasil Pengujian Hipotesis

Untuk menguji pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) secara simultan maupun secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pidie. Dalam uji secara simultan dan parsial dapat dilihat berdasarkan tabel 4.5 dengan cara berikut:

1. Secara simultan

$H_1 : \beta_1 = 0,338, \beta_2 = 0,188, \beta_3 = 0,298$, maka $\beta_1 \neq 0, \beta_2 \neq 0, \beta_3 \neq 0$, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pidie.

2. Secara parsial

$H_2 : \beta_1 = 0,338, \beta_1 \neq 0$, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pidie.

H₃ : $\beta_2 = 0,188$, $\beta_2 \neq 0$, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pidie.

H₄ $\beta_3 = 0,298$, $\beta_3 \neq 0$, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pidie.

4.3.5 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda juga dapat diketahui nilai korelasi dan koefisien determinasinya, nilai korelasi mencerminkan kekuatan hubungan antara variabel independen/bebas yaitu Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pidie.

Tabel 4.10
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.562 ^a	.315	.281	1.130

a. Predictors: (Constant), TOTAL_SPIP, TOTAL_SDM, TOTAL_SAP

b. Dependent Variable: TOTAL_KLK

Sumber : Data diolah SPSS 2023

Hasil uji determinasi pada tabel 4.10 menunjukkan besarnya koefisien korelasi yaitu 0,315, dimana dengan nilai tersebut terdapat hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen yaitu sebesar 32%. Artinya variabel

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (X_1), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) (X_2) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) (X_3) mempunyai hubungan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pidie.

Sementara itu koefisien determinasi yang diperoleh dengan nilai sebesar 0,281 artinya bahwa 28,1% perubahan-perubahan dalam variabel dependen yaitu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pidie dapat dijelaskan oleh variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (X_1), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) (X_2) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) (X_3). Sedangkan selebihnya dijelaskan oleh faktor-faktor lain.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

4.4.1 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pidie

Pengujian secara simultan dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pidie. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pidie. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Hartono

& Ramdany (2020) yang menyatakan bahwa SAP, Sistem Pengendalian Internal dan SDM secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

4.4.2 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pidie

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk Penerapan SAP adalah sebesar 0,338 yang berarti Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pidie. Hasil analisis menunjukkan β_1 sebesar 0,338 dengan hasil perhitungan $\beta_1 \neq 0$, dapat disimpulkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pidie. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian Hartono & Ramdany (2020) yang menyatakan bahwa Penerapan SAP berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Selanjutnya penelitian Dwi et.al. (2019) menyatakan bahwa Penerapan SAP secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penerapan SAP merupakan aturan-aturan yang diterapkan dalam menyusun laporan keuangan, laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang benar. Tingginya Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mencerminkan tingkat baiknya kualitas dari laporan keuangan tersebut.

4.4.3 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pidie

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) adalah sebesar 0,188 yang berarti Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pidie. Hasil analisis menunjukkan β_1 sebesar 0,188 dengan hasil perhitungan $\beta_1 \neq 0$, dapat disimpulkan bahwa Kompetensi SDM secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pidie. Hal ini sesuai dengan kualitas Winarni et.al. (2020) menyatakan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya penelitian dari Pebriani (2019) menyatakan bahwa Kompetensi SDM secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kemampuan pegawai atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik dapat mendukung kualitas laporan keuangan yang sehat, karena Sumber Daya Manusia (SDM) juga berperan dalam penyusunan laporan keuangan.

4.4.4 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pidie

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah sebesar 0,298 yang berarti Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) mempengaruhi Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pidie. Hasil analisis menunjukkan β_2 sebesar 0,281 dengan hasil perhitungan $\beta_1 \neq 0$, dapat disimpulkan bahwa SPIP secara parsial berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pidie. Hal ini sesuai dengan penelitian Dwi et.al (2019) yang menyatakan bahwa SPIP berpengaruh secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian internal pemerintah adalah proses pada setiap tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus pada pemerintahan, baik itu dilakukan oleh kepala pemerintahan ataupun pegawainya. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sendiri diperlukan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan karena sebuah laporan keuangan yang baik juga terbentuk dari sistem yang baik juga.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan, dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) secara simultan cukup berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pidie.
2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) secara parsial cukup berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pidie.
3. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) secara parsial cukup berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pidie.
4. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) secara parsial cukup berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pidie.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diajukan tiga saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat memperluas variabel atau menambah sampel penelitian seperti dari luar Kabupaten Pidie atau menambah periode pengamatan.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan menambahkan variabel bebas lain yang berkaitan dengan variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah seperti Pengawasan Keuangan Daerah dan Teknologi Informasi.
3. Bagi Pemerintahan Kabupaten Pidie yang menjadi subjek dalam penelitian ini agar lebih memperhatikan aspek kompetensi SDM dan SPIP. Memiliki SDM yang kompeten dan SPIP yang berkualitas sangat bermanfaat karena dapat menyelesaikan pekerjaan yang lebih efektif dan efisien, dikarenakan aspek tersebut memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pidie.

DAFTAR PUSTAKA

- Bangun, W. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga
- Dante, N. (2012). *Metode Penelitian*. Edisi 1. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Dwi, F. S., Sri, R., & Wiralestari, W.. (2019). Pengaruh Penerapan SAP, Kompetensi SDM dan SPIP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Akuntabilitas Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris di Kota Jambi).
- Erlina, et.al. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Arual Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 dan Pemendagri No.63 Tahun 2013*. Jakarta: Selemba Empat.
- Fauziah, I. (2018). *SAP Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010*. Jakarta: Ilmu.
- Harahap, S. S. (2015). *Teori Akuntansi*. Edisi Revisi. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Halim, A., et.al. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Selemba Empat.
- Hartono & Ramdany. (2020). Pengaruh SAP, Pengendalian Intern dan Kompetensi SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 9.
- Ikyarti, T., & Aprila, N. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma. *Jurnal Akuntansi*, 9.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press.
- Morissan. (2012). *Metodelogi Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana.
- Nordiawan, D., Putra, I. S., & Rahmawati, M. (2007). *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Selemba Empat.
- Pebriani, R. A. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Banyuasin Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 10.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.*

Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian Bisnis Edisi 6*. Jakarta : Selemba Empat.

Sedarmayanti. (2014). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Mandar Maju.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Supranto, J. (2010). *Statistik (Teori dan Aplikasi)*. Jakarta: UI Press.

Tingginehe, S. M., Adreas, H. H., & Mawarta. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud (Studi Empiris SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Talaud).

Winarni, E., Kurniasih, E. T., & Soleh, A. (2020). Dampak Penerapan Good Governance, Kompetensi SDM, Penerapan SAP, Penerapan SPIP dan Pemanfaatan SIPKD Terhadap Akuntabilitas Publik dan Kualitas Laporan Keuangan (Pemerintah Kota Jambi). *Jurnal Manajemen dan Sains*, 5.

PERDA Kab.Pidie No 4 Tahun 2020

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/168271/perda-kab-pidie-no-4-tahun-2020>

BPK RI <https://www.bpk.go.id/ihps>

AJNN (Aceh Journal Nasional Network) <https://www.ajnn.net/news/kadistanpan-pidie-tindaklanjuti-temuan-bpk-terhadap-keberadaan-68-traktor-roda-dua/index.html>

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) (2014-2021)

[ihps ii 20142898218214](#) , [ihps ii 2021 16533651](#)

LAMPIRAN 1

KUISIONER

**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (SAP),
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) DAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PIDIE.**

Kuisisioner ini dimaksudkan untuk penulisan karya akhir yang bersifat ilmiah sebagai persyaratan tugas akhir pada Universitas Muhammadiyah Aceh, yang difokuskan pada bidang Akuntansi.

Petunjuk pengisian : Beri tanda (✓) pada kolom, yang sesuai dengan pertanyaan yang dipilih berdasarkan kondisi instansi responden.

Identitas Responden

1. Jenis Kelamin

☐

Laki-laki

☐

Perempuan

2. Pendidikan Akhir

☐

SMA/Sederajat

☐

Diploma

☐

Sarjana S-1

☐

Pasca Sarjana S-2

☐

Doktor S-3

3. Masa Kerja

☐

< 5 Tahun

☐

5-10 Tahun

☐

10 Tahun

Mohon Bapak/Ibu berikan tanda cek list (✓) pada salah satu pilihan jawaban sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu mengenai pernyataan yang diberikan.

Pilihan Jawaban:

SS : Sangat Setuju
 S : Setuju
 RG : Ragu-ragu
 TS : Tidak Setuju
 STS : Sangat Tidak Setuju

No	PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN				
	Kualitas Laporan Keuangan (Y)	SS	S	RG	TS	STS
1	Laporan keuangan menyediakan informasi yang relevan andal dengan menegaskan dan dapat mengoreksi aktivitas keuangan dimasa lalu					
2	Infomasi dalam laporan keuangan dapat diandalkan dan diuji, dan apabila diuji oleh pihak yang berbeda akan mewujudkan simpulan yang sama					
3	Laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya					
4	Informasi laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipahami dengan jelas sesuai dengan peraturan yang berlaku					
	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	SS	S	RG	TS	STS
1	Laporan realisasi anggaran sudah sesuai dengan standar yang berlaku					
2	Informasi dalam laporan perubahan saldo disajikan apa adanya sesuai dengan transaksi dan peristiwa keuangan yang seharusnya disajikan					
3	Neraca yang dibuat sudah sesuai dengan prosedur					
4	Laporan operasional yang dibuat sudah sesuai dengan prosedur					
5	Laporan arus kas yang dilakukan oleh pegawai sudah sesuai standar					
6	Perubahan ekuitas yang dilakukan berdasarkan laporan keuangan					
7	Catatan atas laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang telah ditetapkan					
	Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)	SS	S	RG	TS	STS

1	Saya memiliki kemampuan dibidangnya dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik					
2	Saya memiliki kecakapan dan keterampilan dalam menganalisis transaksi dan mengelola laporan keuangan					
3	Saya memiliki pemahaman tentang struktur organisasi tempat kerja					
4	Saya memiliki pengetahuan dan kompetensi di bidang teknologi informasi					
	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	SS	S	RG	TS	STS
1	OPD tempat saya bekerja telah menerapkan Standar Operating Procedure (SOP) secara tertulis.					
2	Ditempat saya bekerja telah menerapkan pengendalian intern dan manajemen terhadap resiko salah saji.					
3	Setiap transaksi dan aktivitas ditempat saya bekerja telah didukung dengan otorisasi dari pihak yang berwenang.					
4	Ditempat saya bekerja telah melaksanakan sistem akuntansi yang memungkinkan audit.					
5	Dalam waktu yang tidak ditentukan pimpinan melakukan pemeriksaan mendadak terhadap catatan akuntansi.					

Terima kasih kepada Bapak/Ibu yang telah bersedia mengisi kuisioner penelitian saya.

Hormat Saya,

FUJI SAFIRA
NPM : 1902110100

LAMPIRAN 2

TABULASI DATA

N o R e s p o n d e n	J E N I S K E L A M I N	P E N D I K A N A K H I R	M A S A K E R J A	K L K 1	K L K 2	K L K 3	K L K 4	T o t a l K L K	S A P 1	S A P 2	S A P 3	S A P 4	S A P 5	S A P 6	S A P 7	T o t a l S A P	S D M 1	S D M 2	S D M 3	S D M 4	T o t a l S D M	S P I P 1	S P I P 2	S P I P 3	S P I P 4	S P I P 5	T o t a l S P I P
1	1	3	2	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	5	4	29	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
2	1	3	2	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	5	4	29	4	4	4	4	16	4	4	4	4	3	19
3	1	3	2	4	3	4	4	15	4	4	4	4	4	5	4	29	5	5	5	5	20	4	4	4	4	4	20
4	1	3	2	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	4	4	28	5	5	5	5	20	4	4	4	4	4	20
5	1	3	2	4	3	4	4	15	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
6	2	3	2	4	3	4	4	15	4	4	4	4	4	5	4	29	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
7	2	3	2	4	4	5	4	17	4	4	4	4	4	5	4	29	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
8	2	3	2	4	4	4	3	15	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	4	4	4	4	3	19
9	1	3	3	4	4	4	5	17	4	4	4	5	4	4	4	29	5	5	4	4	18	4	4	4	4	4	20
10	2	3	3	4	4	4	4	16	5	4	4	4	4	4	4	29	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
11	1	4	3	4	4	4	4	16	4	5	4	4	4	4	4	29	4	4	4	4	16	4	4	4	5	4	21
12	1	3	2	4	4	4	4	16	4	5	4	4	4	4	4	29	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
13	2	4	2	4	4	4	4	16	5	4	4	4	4	4	4	29	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
14	2	3	3	4	4	5	4	17	4	5	4	4	4	4	4	29	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20
15	2	4	3	5	5	5	4	19	5	5	4	4	4	4	5	31	5	4	4	4	17	4	5	4	4	4	21
16	2	3	2	4	4	4	4	16	5	5	4	4	4	4	4	30	4	4	4	4	16	4	4	4	4	3	19
17	1	2	2	4	4	4	4	16	4	5	4	4	4	4	4	29	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20

1 8	2	3	2	5	4	5	5	1 9	4	5	4	4	4	4	4	2 9	5	5	5	5	2 0	4	4	4	4	3	1 9
1 9	2	3	2	5	4	5	5	1 9	4	4	4	4	4	3	4	2 7	5	5	5	5	2 0	4	4	4	4	4	2 0
2 0	2	3	3	4	4	4	4	1 6	4	5	4	4	4	4	4	2 9	4	4	4	4	1 6	4	4	4	4	3	1 9
2 1	2	3	2	4	4	4	4	1 6	4	5	4	4	4	4	5	3 0	4	4	4	4	1 6	4	4	5	4	4	2 1
2 2	1	3	2	4	4	5	5	1 8	4	4	4	4	5	4	5	3 0	4	4	4	4	1 6	4	4	4	4	3	1 9
2 3	2	3	2	5	5	5	5	2 0	5	5	5	5	5	5	5	3 5	4	4	4	4	1 6	4	4	4	4	4	2 0
2 4	1	3	2	5	5	5	5	2 0	4	5	5	5	5	5	4	3 3	4	4	4	4	1 6	4	4	4	4	4	2 0
2 5	2	3	2	5	4	4	4	1 7	4	4	4	4	4	4	4	2 8	5	5	5	5	2 0	4	4	4	4	4	2 0
2 6	1	3	2	4	4	4	4	1 6	5	4	4	4	4	4	4	2 9	5	5	5	5	2 0	4	4	4	4	4	2 0
2 7	1	2	3	4	5	4	5	1 8	5	5	5	5	4	5	5	3 4	4	4	4	4	1 6	4	4	4	4	4	2 0
2 8	1	2	3	4	5	5	5	1 9	4	4	4	4	4	4	4	2 8	4	4	4	4	1 6	4	4	4	4	4	2 0
2 9	1	3	3	4	4	4	4	1 6	4	4	5	4	4	4	4	2 9	4	4	4	4	1 6	4	4	4	4	4	2 0
3 0	2	3	2	4	4	4	4	1 6	4	4		5	4	4	4	2 5	4	4	4	4	1 6	4	4	4	4	4	2 0
3 1	1	4	3	5	5	5	5	2 0	4	5	5	5	5	4	4	3 2	4	4	4	5	1 7	5	4	4	5	3	2 1
3 2	1	3	2	4	4	4	4	1 6	4	4	5	5	5	4	4	3 1	4	4	4	5	1 7	5	5	4	5	4	2 3
3 3	2	3	2	4	4	4	4	1 6	4	4	4	4	4	4	4	2 8	4	4	4	4	1 6	4	4	4	4	3	1 9
3 4	2	3	3	4	4	4	4	1 6	4	4	4	4	4	4	4	2 8	4	4	4	4	1 6	4	4	4	4	3	1 9
3 5	2	3	2	4	4	4	4	1 6	4	5	4	5	4	4	5	3 1	4	4	4	4	1 6	4	4	4	4	4	2 0
3 6	2	3	2	4	4	5	4	1 7	4	4	4	5	5	4	5	3 1	4	4	4	4	1 6	4	4	4	4	4	2 0
3 7	2	3	2	4	4	4	4	1 6	4	5	4	5	4	4	5	3 1	4	4	4	3	1 5	4	4	4	4	3	1 9
3 8	1	3	2	4	4	4	4	1 6	4	5	4	5	5	4	4	3 1	4	4	4	5	1 7	4	4	4	4	3	1 9
3 9	1	4	3	4	4	5	4	1 7	4	4	4	4	4	4	4	2 8	4	4	4	4	1 6	4	4	4	5	3	2 0
4	1	3	2	4	4	5	4	1	4	5	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	1	4	4	4	5	3	2

0								7								9					6						0
4	1	3	2	4	4	4	4	1	4	5	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	1	4	4	4	4	3	1
4	2	3	1	4	4	4	4	1	4	4	4	5	4	5	4	3	4	4	4	4	1	5	5	4	4	4	2
4	3	3	2	4	4	4	4	1	4	4	4	4	5	4	4	2	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	2
4	4	1	3	1	4	4	4	1	4	5	4	4	4	3	4	2	4	4	4	4	1	4	4	4	4	3	1
4	5	3	3	4	4	4	4	1	4	4	4	3	4	3	4	2	4	4	4	4	1	4	4	4	4	3	1
4	6	3	2	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	3	4	2	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	2
4	7	2	4	3	4	5	4	1	4	4	4	4	5	5	4	3	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	2
4	8	1	3	1	4	4	4	1	4	4	5	4	4	5	4	3	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	2
4	9	1	3	2	4	4	4	1	4	4	4	4	4	5	4	2	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	2
5	0	1	3	2	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	2
5	1	1	3	2	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	2
5	2	1	3	2	4	5	4	1	5	5	5	5	4	5	5	3	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	2
5	3	1	3	3	4	4	4	1	4	4	4	4	5	5	4	3	4	4	5	4	1	4	4	4	4	4	2
5	4	2	3	3	4	4	4	1	5	4	4	4	4	5	4	3	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	2
5	5	2	2	2	4	5	5	1	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	1	5	5	4	4	4	2
5	6	2	3	3	4	5	4	1	4	4	4	4	4	5	4	2	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	2
5	7	2	2	2	4	4	4	1	4	4	4	4	5	4	5	3	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	2
5	8	2	3	2	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	5	2	4	4	4	4	1	5	5	4	4	4	2
5	9	1	4	3	4	4	4	1	4	4	4	4	4	5	4	2	4	4	4	4	1	4	4	4	4	3	1
6	0	1	3	2	4	4	4	1	4	3	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	1	4	4	4	4	3	1
6	1	1	2	2	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	2
6	2	1	3	1	4	4	5	1	4	4	5	4	4	4	4	2	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	2

6 3	2	3	2	5	5	5	5	2 0	5	5	4	4	5	4	5	3 2	4	4	4	4	1 6	5	5	4	5	4	2 3
6 4	1	3	1	5	5	5	4	1 9	4	4	4	4	5	5	5	3 1	4	4	4	4	1 6	5	5	5	5	4	2 4

LAMPIRAN 3

KARAKTERISTIK RESPONDEN

Jenis_Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Perempuan	33	51.6	51.6	51.6
	Laki-laki	31	48.4	48.4	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

Pendidikan_Akhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Diploma	6	9.4	9.4	9.4
	Sarjana S-1	51	79.7	79.7	89.1
	Pasca Sarjana S-2	7	10.9	10.9	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

Masa_Kerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<5 Tahun	5	7.8	7.8	7.8
	5-10 Tahun	41	64.1	64.1	71.9
	10 Tahun	18	28.1	28.1	100.0
	Total	64	100.0	100.0	

LAMPIRAN 4

UJI VALIDITAS DAN REABILITAS

		Correlations				
		KLK1	KLK2	KLK3	KLK4	TOTAL_KLK
KLK1	Pearson Correlation	1	.459**	.571**	.427**	.756**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	64	64	64	64	64
KLK2	Pearson Correlation	.459**	1	.428**	.550**	.797**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	64	64	64	64	64
KLK3	Pearson Correlation	.571**	.428**	1	.447**	.782**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	64	64	64	64	64
KLK4	Pearson Correlation	.427**	.550**	.447**	1	.786**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	64	64	64	64	64
TOTAL_KLK	Pearson Correlation	.756**	.797**	.782**	.786**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	64	64	64	64	64

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.631	7

		Correlations				
		SDM1	SDM2	SDM3	SDM4	TOTAL SDM
SDM1	Pearson Correlation	1	.927**	.776**	.630**	.916**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	64	64	64	64	64
SDM2	Pearson Correlation	.927**	1	.840**	.684**	.949**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	64	64	64	64	64

SDM3	Pearson Correlation	.776**	.840**	1	.684**	.907**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	64	64	64	64	64
SDM4	Pearson Correlation	.630**	.684**	.684**	1	.843**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	64	64	64	64	64
TOTAL_SDM	Pearson Correlation	.916**	.949**	.907**	.843**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	64	64	64	64	64

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.920	4

Correlations

		SPIP1	SPIP2	SPIP3	SPIP4	SPIP5	TOTAL SPIP
SPIP1	Pearson Correlation	1	.840**	.225	.519**	.108	.820**
	Sig. (2-tailed)		.000	.074	.000	.396	.000
	N	64	64	64	64	64	64
SPIP2	Pearson Correlation	.840**	1	.225	.358**	.219	.820**
	Sig. (2-tailed)	.000		.074	.004	.082	.000
	N	64	64	64	64	64	64
SPIP3	Pearson Correlation	.225	.225	1	.225	.112	.433**
	Sig. (2-tailed)	.074	.074		.074	.377	.000
	N	64	64	64	64	64	64
SPIP4	Pearson Correlation	.519**	.358**	.225	1	-.115	.571**
	Sig. (2-tailed)	.000	.004	.074		.366	.000
	N	64	64	64	64	64	64
SPIP5	Pearson Correlation	.108	.219	.112	-.115	1	.533**
	Sig. (2-tailed)	.396	.082	.377	.366		.000
	N	64	64	64	64	64	64
TOTAL_SPIP	Pearson Correlation	.820**	.820**	.433**	.571**	.533**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	64	64	64	64	64	64

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.600	5

LAMPIRAN 5

REGRESI LINIER BERGANDA

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-2.270	3.974		-.571	.570		
TOTAL_SAP	.338	.084	.451	4.028	.000	.911	1.098
TOTAL_SDM	.188	.119	.170	1.576	.120	.980	1.020
TOTAL_SPIP	.298	.146	.227	2.045	.045	.929	1.077

a. Dependent Variable: TOTAL_KLK

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.562 ^a	.315	.281	1.130

a. Predictors: (Constant), TOTAL_SPIP, TOTAL_SDM, TOTAL_SAP

b. Dependent Variable: TOTAL_KLK

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	35.322	3	11.774	9.213	.000 ^b
	Residual	76.678	60	1.278		
	Total	112.000	63			

a. Dependent Variable: TOTAL_KLK

b. Predictors: (Constant), TOTAL_SPIP, TOTAL_SDM, TOTAL_SAP

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-2.270	3.974		-.571	.570
TOTAL_SAP	.338	.084	.451	4.028	.000
TOTAL_SDM	.188	.119	.170	1.576	.120
TOTAL_SPIP	.298	.146	.227	2.045	.045

a. Dependent Variable: TOTAL_KLK

LAMPIRAN 6

DESKRIPTIF STATISTIK

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TOTAL_KLK	64	15	20	16.75	1.333
TOTAL_SAP	64	25	35	29.36	1.776
TOTAL_SDM	64	15	20	16.47	1.208
TOTAL_SPIP	64	19	24	20.08	1.013
Valid N (listwise)	64				